

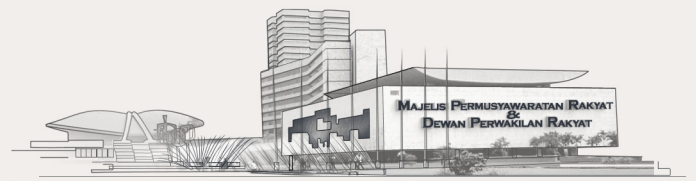


**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 718/III/2012

III/Maret 2012



## Perdebatan APBNP 2012 Alot



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## KEGIATAN DPR RI MINGGU KEEMPAT MARET 2012

Kegiatan DPR-RI minggu keempat bulan maret 2012 diwarnai oleh berbagai pelaksanaan tugas bidang legislasi, pengawasan, anggaran, dan penetapan Pejabat Publik, termasuk kegiatan lain, yaitu kegiatan diplomasi parlemen. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

### Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Di dalam minggu ini, Badan Anggaran melanjutkan pembahasan RUU Perubahan APBN TA 2012 dalam tingkat Panja (Panitia Kerja). Panja yang sudah melakukan pembahasan adalah Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan mulai tanggal 15 Maret 2012 hingga saat ini. Panja bertugas untuk membahas asumsi dasar, pendapatan negara bersumber dari pajak dan non pajak, subsidi energi, besaran defisit dan sumber pembiayaan.

Keputusan asumsi dasar dalam RUU Perubahan APBN TA 2012 yang telah disepakati panja adalah:

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



DPR mengenai hasil pembahasan Perse-putuan Hibah Barang Milik Negara (BMM) berupa KRI KUR-985 Inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kab. Sangihe, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, [2] Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Anggota BPK RI, [3] Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme), [4] Penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai mitra kerja Komisi VI DPR-RI, [5] Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif komisi V

No.	Jenis Asumsi	RUU APBN-P	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,7	6,5
2.	Tingkat suku bunga SPN (%)	6,0	5,0
3.	Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Rp/USD1)	8.800	9.000
4.	Lifting minyak (ribu barel/hari)	950,0	930,0
5.	Harga minyak (USD/Barel)	90,0	105,0

Sementara Badan Anggaran masih melakukan Rapat Panja, beberapa Komisi juga melakukan pembahasan RKA K/L dengan mitra kerjanya untuk disampaikan ke Banggar secara tertulis guna sinkronisasi.

### Rapat Paripurna DPR 20 Maret 2012

Agenda sidang Paripurna adalah: [1] Laporan komisi 1

DPR RI tentang Jalan, menjadi RUU DPR-RI, [6] Pengambilan keputusan atas Usul Hak Interplasi Atas Moratorium Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersarat Bagi Narapidana Korupsi dan Terorisme.

Atas agenda [1], Rapat Paripurna **menyetujui** usulan Komisi I tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMM) berupa KRI KUR-985 Inventaris TNI-AL kepada

Pemerintah Daerah Kab. Sangihe. Komisi I telah menerima surat pada tanggal 29 Desember 2009 dari Bupati Kep. Sangihe Sulut tentang permohonan bantuan sarana, transportasi laut kepada TNI-AL guna percepatan penyediaan sarana transportasi laut di Kab Sangihe, bahwa KRI Karang Unarang-985 sangat cocok digunakan untuk angkutan antar pulau. Atas surat tersebut komisi I membahasnya. Atas dasar UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 46, Komisi I memberikan persetujuan dengan pertimbangan bahwa KRI Unarang-985 ini dapat digunakan sebagai fasilitas laut domestik, untuk mendorong pertumbuhan perkonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Atas agenda [2], hasil pembahasan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Anggota BPK-RI. Rapat Paripurna menyetujui usulan Komisi XI atas 2 calon BPK RI, yaitu: Sapto Amal Dmandari dengan perolehan suara 34, dan Agung Firmam Sampurna perolehan suara 28, untuk menjadi anggota BPK RI periode 2012-2017. Komisi XI menyepakati bahwa apabila diantara 2 calon Anggota BPK tersebut, ada yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau sebab lain, maka calon anggota BPK RI dengan suara terbanyak berikutnya yang akan menggantikan.

Atas agenda [3] berkaitan dengan fungsi legislasi, RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme), telah dibahas oleh Komisi I DPR-RI. Setelah melalui pembahasan maka Komisi I menyetujui untuk disahkan menjadi UU tentang ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme). Rapat Paripurna memberikan persetujuannya. Dalam pembahasan RUU ini Komisi I memberikan catatan untuk menjadi concern Pemerintah dalam pelaksanaan UU ini antara lain: [1] upaya-upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi harus terlebih dahulu mekedepankan perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2] Kebebasan dan keamanan individu adalah hak-hak fundamental setiap warga negara, yang selain tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun juga bersifat tidak terpisahkan. Oleh sebab itu setiap bentuk kebijakan negara mengenai pencegahan, penanggulangan pemberantasan terorisme harus mampu secara jelas, permanen dan serempak melindungi kebebasan dan keamanan warga negara. [3] RUU ini harus mampu menjadi media untuk meluruskan *negative perception* dunia terhadap negara dan agama yang menjadi mayoritas di negeri ini, Islam, yang selama ini terdiskreditkan oleh kejahatan terorisme yang mengembalikan citra islam sebagai negara yang *rahmatan lil 'alamin* sekaligus memulihkan nama baik Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan nilai *diversity* dan *hospitality* nya. Dan [4] Kepada pemerintah agar terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur dengan baik, lebih awal agar kelak dalam rangka pelaksanaan amanah UU konvensi ini dapat mendukung oprasionalisasi dengan baik demi kelancaran tugas di lapangan.

Atas agenda [4], Penetapan Badan Pengusahaan Ka-

wasan Sabang sebagai mitra kerja komisi VI DPR RI, rapat Paripurna memberikan persetujuannya. Dan, atas agenda [5], Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif komisi V DPR RI tentang jalan, menjadi RUU DPR RI, Rapat Paripurna memberikan persetujuannya.

Atas agenda [6], Pengambilan keputusan atas usul hak Interplasi atas Moratorium pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersarat bagi nara pidana Korupsi dan Terorisme, rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi dalam waktu satu minggu untuk mengkaji, dan akan diagendakan kembali dalam rapat Paripurna DPR melalui Keputusan Rapat Musyawarah.

Kegiatan alat kelengkapan DPR, yaitu Badan Kehormatan DPR, telah melakukan berbagai keputusan positif dalam hal penegakan disiplin para anggota Dewan. Badan kehormatan juga mengusulkan dilakukannya evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara, sesuai dengan Rencana Revisi UU MD3 yang sedang dipersiapkan Badan Legislasi DPR dengan diadakannya workshop pada akhir Februari lalu. Tema workshop adalah: Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif, dan Kuntabel. Hasil Workshop disusun dibentuk dalam bentuk proseding yang dijadikan pijakan dalam UU MD3 untuk dapat menyempurnakan permasalahan-permasalahan yang masih ada.

### Diplomasi Parlemen

Rencana pengiriman delegasi DPR RI antara lain: [1] DPR-RI akan mengikuti Sidang *Inter-Parliamentary Union* ke-126 di Kampala, Uganda, tanggal 31 Maret-5 April 2012. Sidang yang selalu diikuti oleh DPR-RI ini, akan dipimpin oleh Wakil Ketua Pramono Anung, dan membahas *Parliaments and People: Bridging the Gap*, juga mengenai *Promoting and practicing good governance as a means of advancing peace and security: Drawing lessons from recent events in the Middle East and North Africa*, kemudian *Redistribution of Power, Not Just Wealth: Ownership of the International Agendas*, dan *Access to Health as a Basic Right: The Role of Parliaments in Addressing Key Challenges to Securing the Health of Women and Children*.

[2] Pengiriman delegasi DPR RI ke *Preparatory Meeting dan ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives* pada tanggal 1-4 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan ini dilaksanakan diantara KTT ASEAN ke-19. Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua DPR-RI dalam kapasitas sebagai Presiden AIPA dan ketua BKSAP selaku delegasi Indonesia.

[3] Persiapan sidang-sidang Parlemen Regional, dimana DPR-RI akan menjadi tuan rumah: *The Executive Committee Meeting dan Ninth Meeting of the AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* pada tanggal 8-12 Juli di Yogyakarta, dan Sidang Umum ke-33 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* pada tanggal 16-22 September 2012 di Santosa Villas dan Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat.\*

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum PIMPINAN PELAKSANA: Jaka Dwi Winarko PIMPINAN REDAKSI: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) ANGGOTA REDAKSI: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; PENANGGUNGJAWAB FOTO: Rizka Arinindya SIRKULASI: Supriyanto Diterbitkan Oleh: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

# Perdebatan APBPNP 2012 Alot

Fraksi-fraksi di DPR memperdebatkan pasal 7 ayat 6A di dalam APBPNP 2012. Pasal itu berbunyi, dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.



Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR membahas APBN-P 2012

Fraksi PPP mengusulkan kenaikan harga BBM dilakukan apabila harga minyak internasional sebesar 10 persen di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012. "PPP meyakini kemampuan masyarakat yang masih kesulitan karena itu setelah mendengarkan aspirasi rakyat dari berbagai daerah, untuk itu Fraksi PPP menghimbau agar ditunda sampai kondisi riil masyarakat siap," ujar anggota DPR dari Fraksi PPP Romihurmuzy saat rapat paripurna, di Gedung DPR, Jum'at, (30/3).

Menurut Romi, PPP yakin pemerintah mampu menganalisis harga minyak dunia sesuai konteks mikro dan makro ekonomi karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM. "Untuk Pasal 7 ayat 6 A, PPP mengusulkan kenaikan atau penurunan lebih dari 10 persen," paparnya.

Kemudian Fraksi PKB mengingin-

kan agar kenaikan harga BBM subsidi bisa dilakukan apabila harga minyak internasional naik 17,5% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.

Sementara Fraksi PAN mengharapkan, pemerintah mengalokasikan energi itu seefisien mungkin. "Kita tidak ingin utang baru, defisit semakin tinggi. Untuk Pasal 7 ayat 6 A, PAN mengusulkan dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen," katanya.

Fraksi PKS mengatakan agar harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah apabila harga minyak internasional naik 20% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012. Sementara Fraksi Hanura, Gerindra, dan PDIP menolak kenaikan harga BBM. (si)foto:ry



Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan bbm di Gedung DPR RI

# Gerindra Sesalkan Banggar Hanya Bahas Opsi Satu

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis menyayangkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) berkaitan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya membahas Opsi 1 (satu), yaitu menyetujui kenaikan harga BBM.

Keputusan yang diambil oleh Banggar sama dengan pemerintah hanya membahas Opsi 1 (satu) menyetujui kenaikan harga BBM, untuk itu fraksi kami tidak memilih untuk membahas. Fraksi kami akan membahas itu mempertimbangkan Opsi 1 (satu) menyetujui kenaikan harga BBM dan Opsi 2 (dua) menolak kenaikan harga BBM pada sidang paripurna dewan sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 146 tentang Keputusan," ujar Fary saat Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR/Korpolkam Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Selasa (27/3).

Fary mengatakan, fraksi kami sudah deadlock kurang lebih 4 (empat) hari dan sudah semestinya kita dapat selesai permasalahan ini. Dalam sidang paripurna ini kami menghormati keputusan untuk kita bahas opsi di Banggar tetapi kami minta juga dibahas Opsi 1 (satu) menyetujui kenaikan harga BBM dan Opsi 2 (dua) menolak kenaikan harga BBM, tegasnya.

"Kami percaya pimpinan bisa memahami dan kami percaya 560 anggota DPR dalam sidang paripurna ini punya hati, punya kepekaan dan perhatian berkaitan dengan kenaikan harga BBM," jelasnya.

Dia mengusulkan dalam sidang paripurna agar segera mengadakan rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk lebih dahulu memutuskan berkaitan dengan apakah merevisi Pasal 7 ayat (6) yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM atau merevisi peraturan tersebut.

Fary mengkhawatirkan apabila nanti dalam laporan sidang paripurna yang akan datang terjadi Opsi 1 (satu) menyetujui kenaikan harga BBM dan Opsi 2 (dua) menolak kenaikan harga BBM, dan hasilnya tidak seperti yang disepakati di Banggar maka fraksi



Anggota Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis

kami akan melakukan deadlock lagi, tegasnya.

Sementara Anggota Fraksi Partai Hanura, Miryam S. Haryani senada agar dua opsi ini untuk dibawa ke dalam sidang paripurna, sehingga dalam pembahasan APBN kedepan tidak hanya diputuskan di Banggar.

"Fraksi Hanura konsisten menolak Opsi 1 (satu) yaitu kenaikan harga BBM sesuai dengan dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pembahasan APBN di Banggar, kami tetap memilih Opsi 2 (dua) yaitu menolak kenaikan harga BBM," kata Miryam. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

# UU Pendidikan Kedokteran Angin Segar Untuk Siswa Cerdas Kurang Mampu

Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang sekarang sedang dibahas Komisi X DPR RI akan membawa angin segar bagi siswa-siswa yang cerdas namun kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto

Dalam Undang-Undang ini nantinya akan mengatur pemberian bea siswa yang berupa ikatan dinas atau bersyarat bagi siswa-siswa berprestasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran atau dari pihak lain.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/3).

Kunjungan Komisi X DPR kali ini dalam rangka uji publik dengan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan praktisi-praktisi Kedokteran di wilayah Jawa Timur.

Utut mengatakan, selain ke Provinsi Jawa Timur, uji publik ini juga dilakukan ke beberapa daerah lainnya yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari uji publik ini, kata Utut, akan dibuat matrik secara keseluruhan untuk lebih menyempurnakan RUU dimaksud.

Rencananya, tambah Utut, RUU ini akan dibawa pada Sidang Paripurna DPR pada 5 April 2012 untuk Pengam-

bilan Keputusan Tingkat II.

Utut mengatakan, RUU Pendidikan Kedokteran ini terdiri dari 9 Bab 71 Pasal. 51 Pasal (72%) dari RUU ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 55.

Tujuan dibuatnya RUU ini menurut Utut adalah untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat, bermutu, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis, dokter subspecialis dan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspecialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Utut menambahkan, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Untuk itulah, diperlukan suatu

undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pendidikan kedokteran.

Lebih jauh Utut mengatakan, RUU Pendidikan Kedokteran ini juga memberi kesempatan kepada calon mahasiswa daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerahnya.

Intinya, kata Utut, RUU ini menjamin adanya kesempatan bagi calon dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender dan masyarakat berpenghasilan rendah.

RUU ini juga membuka adanya jalur khusus yang ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata di seluruh wilayah NKRI.

Selain hal tersebut, RUU ini juga mengatur tentang dana pendidikan kedokteran untuk pengembangan pendidikan kedokteran. Pendanaan dalam RUU ini menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemda, Fakultas, Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan peran serta masyarakat. Dana dari Pemerintah dan Pemda ini berasal dari APBN dan APBD.

Sementara dana dari Fakultas/RSP dari kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedang pendanaan dari masyarakat bisa dari hibah, zakat, wakaf dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut akademisi Universitas Airlangga menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi Komisi X DPR yang concern membahas kembali RUU Pendidikan Kedokteran. Karena pada DPR periode yang lalu RUU ini sudah pernah dibahas, namun akhirnya belum dapat diselesaikan.

Ketua IDI Jatim Pranawa mengatakan, pada prinsipnya, RUU ini telah cukup mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, mulai dari pembiayaan

sampai jenjang-jenjang pendidikan kedokteran.

Bahkan, katanya, RUU ini juga mengatur sampai pada sub spesialis. Hanya saja, pengaturan dokter sub spesialis ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo mengkritisi Pasal 28 ayat (2) huruf c yang mengatakan standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan mahasiswa kedokteran program pendidikan akademik. Seharusnya kontrak kerja sama ini dengan

institusi bukan dengan mahasiswa kedokteran.

Hal lain yang dikritisi adalah Pasal 46 yang menurutnya Pasal tersebut bersifat teknis dan sebaiknya hal-hal yang sifatnya teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). (tt)foto:tt

# Dorong Transfer Teknologi Pembibitan Sapi Australia

Komisi VI DPR dorong peningkatan kerjasama dan transfer teknologi dari Australia terkait pembibitan sapi yang akan dilakukan di Indonesia.



Komisi VI DPR yang di Ketuai oleh Airlangga Hartato (dua dari kanan) saat menerima Menteri Perdagangan dan Daya Saing Australia Craig Emerson

“Jadi isu perdagangan terkini mengenai life cattle antara Indonesia dan Australia dimana mereka mengimpor 350 kg, selain itu mereka memiliki teknologi pembibitan sapi dari 0-350 kg dan kita mendorong adanya alih teknologi dengan Australia,”kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato saat menerima Menteri Perdagangan dan Daya Saing Australia, Craig Emerson di Ruang Pimpinan DPR, Kamis, (22/3).

Selain itu, jelas Airlangga, Australia juga mendorong semakin meningkatnya perdagangan buah-buahan seperti Apel, dan Anggur. “Kita ingin ada hubungan yang respirocal antar kedua negara disatu sisi kita impor Buah-buahan Australia disisi lain kita ingin buah manggis dapat diekspor kesana,”terangnya.

Sekarang ini, jelas Airlangga, masih terkendala pada standar impor di Australia khususnya mengenai kadar

pestisida buah dari Indonesia. “Ini merupakan domain Menteri Pertanian harusnya menyiapkan standar dan jangan memikirkan Impor saja,”katanya.

Sementara Atte Sugandi (F-PD) mendukung terciptanya transfer teknologi dengan melakukan join industri “selain itu perlu ditingkatkan pada sektor lain seperti pendidikan, dan sebagainya,”paparnya. (si) foto:wy/parle

\*\*\*

# Organisasi Pemuda Jangan Tertipu Kepentingan Sesaat

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengimbau organisasi kepemudaan dapat menahan diri, tidak mudah tergoda pada kepentingan instant, kesenangan sesaat. Dalam pemilukada misalnya para pemuda ditarik-tarik kewilayah politik, mendukung kandidat tertentu dengan janji-janji yang menggoda.

“Itu fatamorgana, seolah-olah ada kebahagiaan padahal itu adalah sesat semata. Organisasi pemuda jangan mudah tertarik pada hal-hal instant, tertipu kepentingan politik sesaat. Apalagi kandidat yang diusung kalah, maka usia organisasi tidak akan lama.” kata Marzuki saat menghadiri deklarasi Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (25/3/12).

Kalaupun kandidat yang didukung sukses dalam pemilu dan mendapat

hadiah posisi tertentu, pemuda yang belum matang biasanya tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itulah fakta yang terjadi belakangan ini koruptor yang dijerumuskan pengadilan ke penjara bukan hanya tokoh tua, yang telah senior, tetapi juga generasi muda.

Ketua DPR memberikan apresiasi kepada GPN organisasi kepemudaan yang tumbuh dari bawah, membangun dari desa dengan menegakkan nilai kearifan lokal. “Saya berpesan

komitmen ini harus dipegang secara utuh dan konsisten, membangun negeri berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, tidak ada perbedaan suku, etnis, ditambah nilai-nilai religius.”

Dalam kesempatan itu Marzuki Alie berkenan meresmikan kantor cabang GPN di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Acara peresmian juga dihadiri dalang kondang Ki Enthus Suswono yang juga pembina dari organisasi ini. “Saya di-sms oleh sahabat saya Ki Entus diminta hadir kemari. Saya insyaAllah selalu berupaya hadir memenuhi undangan siapapun kalau waktunya memungkinkan,” imbuhnya.

Dipimpin Ketua Umum-nya Verry Ahmad, anggota GPN Tegal menyampaikan ikrar yang diantaranya menyebut siap menggerakkan seluruh potensi pemuda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemuda yang nasionalis patriotik, religius dan menjunjung tinggi moralitas, mempertahankan NKRI. “Kami bertekad wujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa dengan semangat membangun tanpa cedera,” tegasnya.

Ia menambahkan banyak organisasi pemuda yang tumbuh di tanah air hanya mengakomodir kepentingan kelompoknya saja, tanpa memperdulikan mereka yang berbeda keyakinan, pemikiran dan sebagainya. GPN menurutnya tidak bergerak dari pusat kekuasaan tapi dari bawah, mencoba menghidupkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Very menyebut organisasi kepemudaan yang lahir di Kediri tanggal 28 Oktober 2006 bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda, terus berkembang di desa-desa, kabupaten/kota seluruh tanah air. (iky)foto:parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menghadiri deklarasi Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) di Tegal, Jawa Tengah

# Wajib Kerja Konsekwensi Profesi Kedokteran

Wakil Ketua Komisi X DPR H. Syamsul Bachri dihadapan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menyampaikan, wajib kerja merupakan konsekwensi atau apresiasi kepada negara atas berbagai hal yang diperolehnya selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Oleh karena itu, wajib kerja merupakan suatu konsekwensi yang harus ditanggung oleh mahasiswa apabila dia lulus nanti.

Syamsul Bachri menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Jatim dalam rangka uji publik terkait dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Syamsul mengatakan, profesi kedokteran adalah profesi yang sangat khusus dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian. Selain itu, pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang sangat tinggi, investasi negara dalam hal pendidikan kedokteran sangat tinggi dan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa kedokteran terhadap penyelenggaraan pendidikan itu banyak ditanggung oleh negara/pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, UU ini memang harus menegaskan hak dan kewajiban dokter apabila mahasiswa kedokteran telah lulus nantinya untuk bisa mengambil keputusan apa konsekwensi dari profesi kedokteran. Terutama, katanya, bagi mereka yang mendapat bea siswa, mendapat ikatan dinas dari negara pada saat mereka pendidikan.

RUU ini, kata Syamsul, mengatur lulusan mahasiswa kedokteran yang masuk melalui ikatan dinas, untuk melaksanakan wajib kerja. Lulusan yang tidak menunaikan ikatan dinas, wajib kerja sarjana atau pegawai tidak tetap akan dikenakan sanksi.

“Saya rasa mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak akan keberatan melaksanakan wajib kerja di daerah-daerah terpencil sebagai bentuk apresiasi dan pengabdianya kepada bangsa dan negara,” katanya.

Apalagi mengingat, persebaran



Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Syamsul Bachri

dokter-dokter di wilayah Indonesia sangat timpang sekali, terutama di kabupaten/kota terpencil, terluar, atau di daerah perbatasan.

Untuk memberikan dorongan semangat bagi dokter-dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini tentu saja Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan dari dokter-dokter tersebut dengan memberikan insentif.

Insentif ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan insentif ini harus didorong secara tegas dan berpihak kepada dokter yang memang akan bertugas di daerah terpencil tersebut.

Jadi dalam hal ini, PP nya yang harus diperkuat dan kunci keberhasilan dari RUU ini terletak di PP nya,” tambah Syamsul.

Syamsul menambahkan, terhadap dokter-dokter yang bertugas di daerah terpencil, Pemerintah harus betul-

betul memperhatikan kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka sudah jauh-jauh bertugas di daerah terpencil tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Hal inilah yang sering membuat dokter-dokter tersebut enggan untuk bertugas di daerah tersebut.

Bagaimana dengan mahasiswa kedokteran yang pembiayaan pendidikannya seluruhnya ditanggung sendiri, apakah mereka juga wajib melakukan wajib kerja?

Dalam hal ini menurut Syamsul, ini masih menjadi perdebatan panjang yang sampai sekarang masih belum selesai. Namun dia berharap, hasil pembahasan bagi mahasiswa tersebut dapat mencerminkan sesuatu yang berkeadilan dengan konsekwensi-konsekwensi tertentu dan tetap memiliki empati yang tinggi bagi mahasiswa tersebut terhadap profesinya sebagai seorang dokter. (tt) foto:tt

# RUU Daerah Kepulauan Mengatur Hal-Hal Secara Komprehensif

Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang sekarang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan memuat secara komprehensif untuk memajukan daerah kepulauan sejajar dengan daerah-daerah lainnya di daratan.

RUU ini tidak hanya bicara tentang angka dalam arti anggaran yang akan dialokasikan untuk daerah kepulauan, tapi lebih jauh dari itu RUU ini juga menyangkut kepentingan seluruh masyarakat di daerah kepulauan baik pendidikannya, ke-

kat untuk memperhatikan sungguh-sungguh tujuh provinsi daerah kepulauan. Namun dia mengingatkan telah banyak regulasi yang mengatur hal ini. Jika hanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja yang duduk di sini, ten-

Memang, katanya, untuk mengatur daerah kepulauan ini perlu political will yang sungguh-sungguh dan melibatkan sektor-sektor yang terkait. Masalahnya cukup ruwet tinggal bagaimana political will yang kita lakukan untuk mengangkat tujuh provinsi kepulauan dari ketertinggalannya.

Sementara Direktur Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan mengatakan, kita perlu mencari keseimbangan dengan tidak mengesampingkan kewenangan yang bersifat berkeadilan.

Rumusan ini yang harus kita dudukkan dan kita cari. Kalau menambah kewenangan kelautan hanya di daerah kepulauan, tentunya hal ini akan mengundang kecemburuan bagi daerah lain yang memiliki laut akan menuntut hak yang sama.

Disinilah perlunya mencari formula yang pas untuk menseimbangkan hal itu. Apakah perlu melahirkan UU atau kalau menyangkut kewenangan apakah tidak bisa dikaitkan dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi pernyataan dua nara sumber tadi, Alex menambahkan, hal itu pernah dicoba diperjuangkan masuk di APBN, tapi tidak pernah bisa masuk. Dalam hal ini, Pemerintah tidak punya goodwill, akhirnya yang terjadi negosiasi antara Pemerintah dengan DPR. Di sini tidak ada dasar hukumnya.

Kalau anggaran bagi daerah kepulauan ini masuk di APBN, tiap tahun akan terjadi perubahan. Padahal, kata Alex, kita menginginkan dana itu lestari. Namun ada affirmative action dalam satu kurun waktu tertentu yang pada akhirnya harus selesai.

"Affirmative action dalam artian sewaktu-waktu stop, kalau daerah-daerah tersebut sudah sama dengan

daerah-daerah lain UU tersebut dicabut," katanya.

Intinya, kata Alex, daerah kepulauan ini tidak mau diperlakukan sama dengan daratan, ada hal yang berbeda karena karakteristik daerahnya berbeda. Dan ini tidak cukup hanya dianggarkan di APBN saja, tapi harus dengan undang-undang.

Seusai mengundang dari dua kementerian, sore itu Badan Legislasi DPR juga mengundang perwakilan

dari Kementerian Keuangan, Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), dan Badan Kerjasama Provinsi.

Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah mengatakan, Baleg memandang perlu untuk mengundang nara sumber tadi terkait dengan bagaimana cara penghitungan di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk provinsi-provinsi di kawasan kelautan.

Selain itu bagaimana perspektif pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan dan bagaimana perencanaannya dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan.

Tentunya, kata Anna, masukan dari mitra-mitra tersebut sangat bermanfaat untuk menyempurnakan Bab mengenai pendanaan bagi percepatan pembangunan daerah kepulauan. (tt) foto:parle

## Pembangunan Dermaga Teluk Sabang Masih Terkendala Regulasi

Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. II Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah meninjau pembangunan Dermaga Teluk Sabang yang hingga kini masih terkendala regulasi. Pembangunan pelabuhan tersebut sudah dimulai dari tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya.

Hal ini diungkapkan Ketua rombongan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. II tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Ir. Nova Iriansyah yang melakukan peninjauan langsung ke Sabang beberapa waktu yang lalu.

Nova Iriansyah juga menambahkan, bahwa Tim Pemantau UU No. II yang menyangkut khusus Pemerintahan Aceh, yang kita lakukan pertama adalah memantau masalah perundang-undangan regulasi yang diperintahkan oleh UU tersebut. Pemantauan terhadap ini memang agak ketat kita laksanakan karena ada beberapa PP lagi yang belum terbit, padahal UU Pemerintahan Aceh itu mengamanatkan penerbitan PP itu selambat-lambatnya 2 tahun yang seharusnya 2008 sudah terbit, ternyata sampai sekarang ada beberapa PP lagi yang belum terbit padahal ini sudah enam tahun lamanya.

Dia mengatakan, yang pertama sejauh mana memantau regulasi UU sudah terbit apa belum dan yang kedua baru bisa dipantau peraturan Perundang-undangan operasional yang mengikuti UU tersebut sejauh mana keadaannya yang efektif dilapangan,



Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. II Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh saat meninjau pembangunan Dermaga Teluk Sabang, Aceh.

terutama yang menyangkut bidang-bidang perekonomian, ya memang ujung-ujungnya bermuara kepada kesejahteraan, jelas Nova.

Ketua Tim Pemantau Nova Iriansyah menambahkan, dengan Peraturan Pemerintah hasil UU Peraturan tentang Aceh apakah hal itu sudah dilakukan apa belum. Jadi sejauh mana tindak lanjut PP itu sendiri, sehingga apa yang

sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan, kemudian efektifitasnya juga bermanfaat apa tidak PP itu, karena jika PP itu bermanfaat berarti UU itu sendiri sudah tepat, kata Nova

Kemudian yang diperhatikan ke-marin, karena semua ini bermuara kepada kepemimpinan di Aceh tentang kepemimpinan, kemaren secara

Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah

sehatannya termasuk hukum adatnya.

Demikian disampaikan Anggota Baleg Alex Litaay saat rapat dengar pendapat dengan Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (27/3), yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah.

Alex menyatakan hal ini terkait dengan apa yang disampaikan Perwakilan dari ke dua kementerian yang menanyakan apakah RUU ini betul-betul diperlukan, mengingat sudah banyak regulasi-regulasi lain yang terkait dengan hal tersebut.

Zubaidi, wakil dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan, dia sepa-

tunya akan sulit. Dalam hal ini, perlu melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya.

Bahkan Zubaidi mengusulkan dimasukkan dalam APBN saja, karena setiap tahun kita membahas APBN. "Kenapa tidak pada saat perumusan itu ada kesepakatan mengalokasikan untuk daerah kepulauan, tidak harus dalam bentuk perumusan UU," katanya.

Menurutnya, ini perlu pertimbangan matang, karena kalau membuat UU, sudah banyak regulasi yang sudah ada. Dan dikhawatirkan jika UU ini terbentuk akan menimbulkan permasalahan baru.

khusus karena ada konflik menjelang pilkada yang kata orang sisi konfliknya masalah regulasi memang kita agak khusus memperhatikan masalah pilkada yang akan dilakukan secara serentak yang berbarengan di 17 Kabupaten/kota satu propinsi.

“Alhamdulillah dengan pantauan dan fasilitasi dari kita jadi semua konflik regulasi dapat selesai kemudian deklarasi damai pun juga sudah terlaksana” tegasnya..

Dikatakan juga bahwa masalah perekonomian itu, mendapat sorotan karena sampai sekarang belum dirasakan manfaatnya, disinilah terasa bahwa Tim pemantau ini sangat dibutuhkan, karena peraturan yang setingkat dengan Peraturan menteri saja masih banyak yang terkendala dan masih banyak yang menyangkut, sehingga UU itu belum bisa beroperasi khususnya untuk kawasan Sabang.

Nova Iriansyah yang sekaligus memimpin kunjungan ke Sabang mengemukakan, ada 9 Peraturan Menteri (Permen) yang seharusnya sudah terbit, namun semuanya itu belum bisa dioperasikan, mengingat Sabang baru ada 3 Permen yang berjalan selebihnya berdiri ditempat, ujar Nova.

Dia bertekad akan melakukan terobosan dan sumbangan politik yang terkait dengan aplikasi UU itu sendiri, karena kadang-kadang secara teknis itu bisa dan tidak ada masalah akan tetapi ada saja kendala-kendala politik yang kita dorong pemerintah untuk

masalah seperti ini jangan sampai terkendala lagi. seperti Pelabuhan Teluk Sabang itu sendiri secara fisik sudah selesai dermaga dan kelengkapan dermaga selesai di tahun 2012. Namun demikian yang namanya pelabuhan tentunya tidak hanya fisiknya saja, di pelabuhan itu ada yang namanya manajemen kesahbandaran, yang nantinya mengatur kegiatan pelabuhan tentang perdagangan dan sebagainya nah inilah para pihak yang terkait itu yang saya katakan tadi.

Walaupun sudah ada 9 Kementerian disitu pelabuhan tidak bisa operasional apabila kesembilan menteri yang terkait ini tidak menerbitkan peraturan menteri untuk menindaklanjuti operasionalnya, ditingkat operasional harus ada Menteri tersebut termasuk Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, jadi kalau fisik dermaga, gedung dan lainya sudah selesai tanpa manajemen kesahbandaran itu tidak bisa beroperasi, tegas Nova.

Semua keorganisasian dengan ini itu terkait dengan Peraturan Kementerian itulah yang masih macet sehingga kemungkinan tim ini harus segera melakukan sesuatu, secepat mungkin akan mengundang para Menteri terkait.

Mengingat dana pembangunan Dermaga Tuluk Sabang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 39 triliun rupiah, namun dana tersebut tidak hanya dari bersumber APBN dan APBD saja, diharapkan semua itu bisa

dari APBN Otsus Ota termasuk juga diharapkan dana dari infestasi pihak luar maupun dalam negeri.

Kalu kendala dari APBN saya pikir tidak ada, karena ABPN secara proposional tiap tahun sudah diturunkan ke Sabang hanya saja kendalanya dana dari APBK dan dana-dana dari yang lainnya itu tidak ada. Yang kendala memang infestasi dari pihak luar yang belum ada yang masuk ke Sabang. Semua itu terkendala karena masalah yang tadi yaitu masalah regulasi yang menyumbat.

Jadi regulasi itu sebetulnya tidak ada regulasi yang sulit, karena apa, UU sudah ada, PP pun sudah ada, namun operasional PP itu memang harus ada Kepmen, atau Permen Peraturan Menteri, Peraturan Menteri inilah yang belum dilaksanakan sehingga semua ini belum bisa berjalan termasuk infestasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketua rombongan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.II tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Nova Iriansyah menegaskan, bahwa selama ini memang belum bisa berjalan tanpa Permen, terkait dengan pantauan dilapangan yang masih terkendala, maka hal ini akan dicoba mencari terobosan untuk mendorong para Menteri agar bisa menyelesaikan masalah ini. Dan Menteri tersebut akan kami undang agar kita tau apa sebenarnya kendala yang dihadapi sehingga masalah Permen tersebut segera dipercepat dan segera diselesaikan. (Spy). foto:parle

## DPR Segera Revisi UU Tentang Ormas

DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas yang telah ada sebelumnya. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak mampu lagi mengatur masalah organisasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas, Deding Ishak (F-PG) saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diwakili Sekda Sumut Nurdin Lubis, di Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumut, Senin(19/3).

Pansus RUU Ormas saat ini, lanjut-

nya, terus mencari masukan dari berbagai kalangan, baik instansi pemerintah, para pakar, ormas maupun LSM atau NGO. “Kita mengharapkan RUU tentang Ormas nantinya benar-benar dapat mengakomodir berbagai kepentingan ormas di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Deding, hanya undang-

undang yang bisa mengatur itu. Sementara dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum tentunya pengaturan sebuah keberadaan dan peran organisasi diharapkan akan membantu bagaimana peran ormas nantinya.

“Sejatinya tentu, ormas ini sebagai wadah partisipatif aktif masyarakat yang berbanding lurus dengan tujuan

kehidupan berbangsa dan bernegara yang pelaksanaannya tentu dalam konteks bagaimana memperdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi usaha-usaha pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan,” paparnya.

Deding menambahkan, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paradigma berserikat dan berkumpul dibedakan dalam 2 (dua) wadah, yaitu Partai Politik dan Organisasi non Partai Politik (Organisasi Masyarakat). Dengan demikian, lanjutnya, apakah dapat dipahami bahwa ormas mencakup keseluruhan organisasi sosial yang ada, baik organisasi keagamaan, OKP, LSM/NGO’s, organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi maupun organisasi sosial lainnya.

Bagaimana kelemahan, hambatan dan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat, tanya Deding. “Itu juga menjadi salah satu dasar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Ormas yang menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.

Melalui pengaturan dalam undang-undang itulah maka pelebmbagaan partisipasi masyarakat diharapkan dapat terlaksana dan memperoleh perhatian pemerintah, ujar Deding seraya menambahkan karena berkaitan dengan aspirasi sejumlah orang dengan argumentasi yang kuat.

Sementara Sekda Sumut Nurdin Lubis yang mewakili Gubernur Provinsi Sumut mengatakan, perkembangan dan kondisi saat ini keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang, tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi ormas yang menimbulkan eksekutif serta meresahkan masyarakat. Di sisi lain masyarakat masih menginginkan dan mempertahankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat sebagai regulasi yang mengatur berdirinya sebuah organisasi kemasyarakatan.

“Oleh karena itu, Pansus RUU Ormas dapat merumuskan regulasi bagi



Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas, Deding Ishak



Suasana pertemuan antara Tim Pansus RUU tentang Ormas dengan Sekda Sumut beserta jajarannya di ruang beringin kantor Gubernur Sumatera Utara

organisasi kemasyarakatan yang lebih partisipatif dalam pembangunan serta lebih profesional,” kata Nurdin.

Ia berharap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat dapat menjadi prioritas untuk dibahas dalam masa persidangan tahun 2012. “Sehingga kebebasan berorganisasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang anti demokrasi dan anti persatuan nasional untuk memprovokasi terjadi konflik antar suku, ras, agama, dan antar golongan,” tegasnya.

Pansus RUU Ormas melakukan kunjungan ke Provinsi Sumut dipimpin Ketua Tim Pansus Deding Ishak (F-PG) dan sejumlah anggota lintas fraksi yang berada di DPR. Yakni, Ade Surpriatna dan Syamsul Bachri S (F-PG), Hb. Nabel Almusawa (F- PKS), Sumarjati Arjoso (F-Partai Gerindra), dan Maryam S. Haryani (F-Partai Hanura). Kedatangan Tim Pansus RUU Ormas ke Provinsi Sumut untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pembahasan RUU Ormas.(iw)/foto:iwan armanias/parle

## DPR Tetapkan Anggota KPU dan Bawaslu

Rapat Paripurna DPR menetapkan 7 calon nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon nama anggota Bawaslu untuk disetujui.



Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso saat berfoto bersama dengan calon anggota KPU



Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso saat berfoto bersama calon anggota Bawaslu

“Tiba saat nya saya ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan pembahasan atas pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu dapat di setujui,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/3) “Setuju...” teriak anggota sidang Paripurna DPR secara bersama-sama

dan palu pun di ketuk oleh pimpinan sidang tanda setuju.

Priyo menambahkan, karena DPR telah menyetujuinya, dan selanjutnya akan segera diproses sesuai dengan mekanisme lebih lanjut, “Dan saya ucapkan selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu terpilih, semoga Allah SWT memberkahi langkah-langkah kita,” ujar politisi Partai Golkar ini

Sebelumnya Komisi II DPR beberapa waktu yang lalu telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu, hasil dari proses pemilihan tersebut menetapkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu.

Berikut nama-nama ke tujuh anggota KPU terpilih, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro.

Dan 5 nama-nama anggota Bawaslu terpilih yakni Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengharapkan KPU dan Bawaslu dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, karena salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

## Pemilu Harus Murah, Mudah, dan Berkualitas

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan Pemilihan Umum tahun 2014 yang akan datang harus lebih murah dari sisi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan lebih berkualitas hasilnya. Untuk itu RUU tentang revisi UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR/DPD/dan DPRD yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR RI, dapat menghasilkan UU yang mendukung untuk tujuan tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua DPR saat menjadi pembicara kunci pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional ke XI Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (21/3).

Ketua DPR mengungkapkan masih ada empat masalah krusial yang belum disepakati fraksi-fraksi. Yakni sistem pemilu, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), jumlah daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi dalam satu dapil, serta metode penghitungan suara menjadi kursi.

Marzuki memaparkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka berdasarkan suara terbanyak yang dipakai pada Pemilu 2009 terbukti kurang efektif, berbiaya mahal, dan banyak menimbulkan masalah. “Pertarungan tidak hanya terjadi pada calon antar partai politik, tetapi sesama kader di internal satu partai politik pun terjadi saling jegal,” ungkap wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini. “Kertas suara pun berlembar-lembar yang membingungkan masyarakat pemilih,” tambahnya.

### Jangan matikan yang kecil

Terkait keinginan beberapa partai politik untuk menaikkan angka Parliamentary Threshold/PT sampai 5%, Marzuki berpesan agar jangan ada keinginan untuk mematikan partai-partai kecil, karena belum tentu parpol yang besar-besar memiliki kursi di daerah, begitu pun sebaliknya. Dia mengingatkan, dalam Negara Pancasila, yang besar melindungi yang kecil, dan yang kecil menghormati yang besar. “Bukan yang kecil malah dimatikan oleh yang besar,” tandasnya.

Keberadaan partai politik penting bagi kelangsungan demokrasi, sebab



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka acara Rapat Kerja Nasional ke XI Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang berlangsung di kota Banjarmasin, Kalsel

partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. “Jika partai politik tidak ada maka kita akan kembali ke masa seperti orde baru yang otoriter,” ucap politisi senior Partai Demokrat ini.

Ketua DPR berharap UU pemilu dibuat untuk jangka panjang tidak seperti sekarang yang berubah setiap menjelang Pemilu. “Seharusnya UU pemilu bisa berlaku untuk 3-4 kali pemilu atau 20 tahun, tidak seperti sekarang tiap 5 tahun ganti,” imbuhnya.

Ketua Adeksi Wisnu Wardhana dalam sambutannya mengatakan, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2009 terbukti menimbulkan banyak masalah yang berakibat pada rendahnya kualitas pemilu. “Mulai dari masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), kertas suara yang rumit karena memuat 150 sampai 500-an nama calon, cara perhitungan kursi yang sampai 4 tahap, hingga berujung di Mahkamah Konstitusi,” paparnya. “Sengketa pemilu yang masuk di MK mencapai 700 kasus pada Pemilu 2009,” tambahnya.

Wisnu menjelaskan, memilih adalah hak asasi warga Negara yang dilindungi UU dan bersifat universal. Akibat DPT yang bermasalah jutaan warga Negara kehilangan hak suaranya.

“Tim Penyelidikan Hak-hak Sipil dan Politik Komnas HAM melaporkan, dalam Pemilu 2009 terdapat 25-40% pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sementara LP3ES mengungkapkan pada periode Juli-Agustus 2009 terdapat 20,8% pemilih belum terdaftar,” ungkap Ketua DPRD Kota Surabaya ini. Dia berharap RUU pemilu yang sedang dibahas Pansus DPR ini benar-benar dapat menghasilkan UU Pemilu yang berkualitas.

Pada acara pembukaan Rakernas Adeksi ke XI ini turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ruslan, SE., Wakil Walikota Banjarmasin Irwan Ansyari, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, dan utusan dari DPRD Kota se-Indonesia. Acara berlangsung hingga 23 Maret 2012. (Rn.Tvp) foto:rn/parle



# UU Pendidikan Kedokteran Syaratkan Lulus Psikometri

RUU Pendidikan Kedokteran dalam satu pasalnya mensyaratkan calon mahasiswa kedokteran harus lulus seleksi penerima, uji kognitif, tes bakat dan tes kepribadian.

Persyaratan ini dianggap penting karena Profesi Kedokteran berbeda dengan profesi-profesi lainnya dan dokter punya profesi yang strategis sehingga membutuhkan kehati-hatian serta diperlukan calon-calon dokter yang memiliki empati tinggi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar saat pertemuan dengan akademisi Universitas Airlangga dan praktisi-praktisi Kedokteran Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/3).

Menurut Dedi, kita tidak boleh hanya berpikir bahwa dokter adalah

kan dalam salah satu pasal persyaratan calon mahasiswa kedokteran yang harus lulus seleksi psikometri.

Dedi memprihatinkan, banyak lulusan dokter-dokter sekarang yang kurang memiliki empati. Dokter-dokter tersebut setelah lulus banyak yang tidak mau ditempatkan di desa-desa di kepulauan kecil maupun daerah perbatasan. Sehingga, katanya, yang beroperasi di sana dokter-dokter dari Malaysia

“ini tentunya sangat membahayakan dalam konteks perspektif geo-

nusiaan mahasiswa tahun pertama dan keempat Fakultas Kedokteran UI rendah. Itu hasil tes psikometri mengetahui kesesuaian kepribadian mahasiswa dengan karakteristik profesi dokter.

Bahkan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Ratna Sitompul mengatakan, program empati dan kemanusiaan perlu diformalkan dalam pendidikan kedokteran sehingga dokter yang dihasilkan tak hanya pintar, tetapi juga bisa melayani dengan hati.

Ratna yang juga Dekan Fakultas Kedokteran UI ini mengatakan, ini sebelum jadi mahasiswa kedokteran, mereka hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika lingkungan sekitar tidak mengajarkan dan melatih jiwa sosial dan kemanusiaan, bagaimana mereka memiliki perasaan itu.

Untuk mengatasi hal itu, FKUI telah mengembangkan program Empati, Komunikasi, dan Bioetika untuk Pengembangan Pribadi dan Profesi Kedokteran dalam Konteks Humaniora. Salah satu cara, mewajibkan mahasiswa tahun pertama hingga ketiga menjadi relawan di RS Cipto Mangunkusumo.

Mereka wajib mendampingi pasien baru dari luar Jakarta, mulai menunjukkan unit-unit perawatan di RS hingga membantu mengurus administrasi pasien miskin. Mereka juga ikut kunjungan ke daerah mengetahui kondisi riil masyarakat dikaitkan persoalan sosial, budaya, dan psikologi masyarakatnya.

Hasil tes psikometri itu, kata Dedi, tentunya sangat mengejutkan, UU ini harus punya keberanian mengatur hal tersebut untuk dapat menghasilkan dokter-dokter yang memiliki empati tinggi.

Selain itu, RUU Pendidikan Kedokteran ini juga diharapkan dapat mengantisipasi penerapan AFTA dan WTO akibat ketimpangan yang terjadi. (tt) foto:tt/parle

\*\*\*



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar

profesi, yang paling tinggi dari profesionalitas adalah tanggung jawab sosial. Disinilah dituntut calon-calon dokter yang memiliki moralitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

Profesi Kedokteran, kata Dedi, sangat berbeda dengan seorang insinyur atau seorang ekonom, dimana kegiatannya sangat erat hubungannya dengan nyawa manusia.

Untuk itu, dalam konteks UU Pendidikan Kedokteran mulai dari rekrutmen mahasiswanya harus betul-betul terpilih. Disinilah perlunya memasuk-

politik, karena ini terkait dengan persoalan NKRI,” katanya.

Dokter-dokter tersebut lebih menyukai praktek di kota-kota besar sehingga terjadi ketimpangan antara kota-kota besar dengan daerah-daerah kecil. Menurut Dedi, Dokter-dokter sekarang banyak yang kurang memiliki empati. Bahkan yang lebih memprihatinkan setelah lulus pendidikan kedokteran ada yang menjadi agen obat atau masuk ke bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan ilmu kedokteran.

Sebuah harian nasional terkemuka menyebutkan, empati dan rasa kema-

# Badan Anggaran Belum Ambil Keputusan Harga BBM

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) belum mengambil keputusan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Ada kemungkinan dua opsi subsidi BBM diajukan ke paripurna DPR apabila tidak ada kesepakatan dalam rapat kerja Badan Anggaran dan Pemerintah,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan.

Rapat Kerja yang digelar maraton, dipimpin Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng, hadir Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, sejak Sabtu (24/3) hingga minggu malam (25/3), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dua opsi tersebut, yaitu Pertama total subsidi energi Rp.225 triliun, dengan rincian Rp.137 triliun untuk BBM, Rp.65 triliun untuk listrik, dan Rp.23 triliun sebagai cadangan risiko fiskal energi. Sebagai kopensasinya Rp.30,6 triliun untuk infrastruktur pedesaan dan orang miskin.

Masih termasuk opsi pertama ialah amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (6) tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Artinya, opsi pertama mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi yang diusulkan Pemerintah Rp.1.500/liter,



Suasana Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di gedung DPR RI

dari Rp.4.500/liter menjadi Rp.6.000/liter, pada 1 April.

Opsi kedua, besaran subsidi energi Rp.266 triliun, dengan perincian Rp178 triliun untuk BBM, Rp.65 triliun untuk listrik, dan Rp.23 triliun untuk

cadangan risiko fiskal energi. Opsi ini tetap mempertahankan UU 22/2011 Pasal 7 (6). Artinya, Opsi kedua tidak setuju kenaikan harga BBM bersubsidi. (as)foto:wy/parle

\*\*\*

# Gerindra dan Hanura Walk Out Saat Bahas BBM

Fraksi Gerindra dan Hanura Walk Out saat pembahasan opsi 1 atau 2. pasalnya pemerintah hanya mau membahas opsi 1 saja tidak keduanya.

“Tatib (tata tertib) menjelaskan, silakan teman-teman membahas mengenai opsi 1 atau 2, jangan justru bahas sepihak. Kenyataannya pemerintah hanya mau bahas opsi 1 ini. Kita akan berikan pandangan nanti saat Paripurna saja, kemungkinan hari Kamis berkaitan dengan pasal 7 ayat 6,” kata Fary Djemy Francis disela-sela Rapat dengan Pemerintah dan Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Fary menegaskan, Partai Gerindra

secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Gerindra, terang Fary memilih opsi 2 yakni tidak menyetujui kenaikan harga BBM dengan menghapus pasal 7 ayat 6 tersebut.

Terdapat usulan dua opsi yakni, opsi 1 menyetujui kenaikan harga BBM dan opsi 2 menolak kenaikan BBM. “Pemerintah hanya ingin membahas kenaikan harga BBM saja tidak ada opsi lainnya,”terang anggota DPR dari Hanura Ali Kastella (si) foto:tim Parle

\*\*\*



Anggota Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis

# Komisi IV DPR Setuju Penghematan APBN Tahun 2012 Untuk Kementerian Pertanian Sebesar 632 Miliar.

Penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012 sebesar 632 miliar rupiah.



Wakil Ketua komisi IV DPR Herman Khaeron (tengah) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Hal seperti ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kebijakan perubahan tentang subsidi BBM. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Suswono. Rapat Kerja tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi IV DPR Senayan Jakarta, Kamis, (29/3) pagi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron yang sekaligus memimpin rapat tersebut menambahkan, bahwa selain penghematan anggaran Kementerian Pertanian juga telah menyepakati mengenai usulan tambahan anggaran sebesar 3 triliun rupiah pada APBN-P 2012, yang rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program surplus beras 10 juta ton di tahun 2014.

Herman Khaeron mengemukakan, bahwa penyempurnaan perubahan RKA K/L tahun anggaran 2012 dialokasikan waktu hanya satu hari (tanggal 28 Maret 2012), dan disampaikan ke Badan Anggaran sebagai bahan penetapan paling lambat tanggal 29 Maret 2012, maka Komisi IV DPR menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri

Pertanian dalam rangka membahas penyempurnaan perubahan RKA K/L tersebut sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran, jelas Herman.

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menambahkan bahwa rapat antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian tanggal 7 Maret lalu, telah menyetujui penghematan APBN kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2012 sebesar 632 miliar rupiah, dan Kementerian Pertanian juga telah membahas lebih lanjut rencana penghematan tersebut.

Menteri Pertanian Suswono juga mengemukakan, dengan mempertimbangan hal-hal tersebut, pengurangan anggaran diupayakan diambil dari satker pusat dan seminimal mungkin mengambil dari satker daerah, dengan maksud agar program-program yang sedang berlangsung dilapangan tidak berhenti karena proses revisi, mengurangi kemungkinan terjadinya pagu minus, serta agar tidak mempengaruhi laju kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Namun demikian, mengingat dalam struktur anggaran APBN Kementerian

Pertanian sebesar 70% dialokasikan di daerah, dan keterbatasan dan belanja barang non operasional yang berada di pusat maka alokasi penghematan tersebut tidak terlaksanakan untuk mengambil sebagian anggaran dari pos belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja sosial. Untuk penghematan yang mengambil dana dari daerah diarahkan pada kegiatan yang penggunaan dananya tidak akan dapat dilaksanakan oleh daerah karena masalah kesesuaian lapangan.

Suswono juga menambahkan, bahwa Kementerian Pertanian pada tahun 2012 telah diputuskan oleh Menko Perekonomian akan memperoleh dukungan tambahan dana sebesar 2 triliun rupiah dari dana cadangan stabilisasi pangan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Alokasi ini telah disepakati pada rapat Koordinasi Bidang Perekonomian pada tanggal 14 Maret 2012. Penambahan dana ini sangat diperlukan, mengingat diperlukan percepatan pencapaian sasaran untuk meningkatkan produksi padi mengantisipasi kemungkinan perubahan iklim yang terjadi saat ini, jelas Suswono.

Untuk itu, tambahan anggaran yang berasal dari dana cadangan stabilisasi pangan sebesar 2 triliun rupiah tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton, dengan kegiatan yang meliputi antara lain, SL-PTT padi non hibrida seluas 360 ribu ha, penguatan kelembagaan penyuluhan, pengawalan/pendampingan penyuluh dan pemberdayaan petani melalui demfarm, bantuan penanggulangan padi puso serta penanganan pasca panen, tegas Suswono. (Spy). foto: parle

## Ketua DPR dan Gubernur NTB Bahas Kesiapan Sidang AIPA

Saya sering menghadiri forum internasional, disana saya mendengar sendiri masih banyak yang belum kenal Indonesia secara utuh, mereka tahunya Bali, Jakarta. Akhirnya saya berpandangan negeri kita ini harus dipromosikan. Gimana caranya dengan melaksanakan forum internasional di daerah yang kita anggap cukup siap," kata Ketua DPR Marzuki Alie usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, NTB, Senin (26/3/12).

Sebelumnya banyak yang meragukan kemampuan daerah dalam menggelar acara tingkat internasional, namun ini terjawab di Palembang saat DPR sukses menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara anggota OKI (PUIC) yang dihadiri 45 negara.

"Untuk tingkat Asean saya pikir Lombok lebih dari memadai makanya untuk memastikan itu saya sengaja berkunjung dan melangsungkan pertemuan dengan Pemprov NTB dan meninjau tempat pelaksanaan acara yang diusulkan," lanjut Marzuki yang terpilih menjadi Presiden AIPA dalam Sidang Umum ke-32 di Phnom Penh, Kamboja tahun lalu.

Dalam kunjungan tersebut Ketua DPR bersama Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya meninjau ballroom tempat pelaksanaan sidang dan hotel tempat menginap anggota delegasi. Rombongan juga berkunjung ke pulau Gili Trawangan yang diusulkan Pemprov NTB untuk memperkenalkan potensi wisata bahari daerah ini.

"NTB punya potensi alam yang luar biasa. Di Gili Trawangan saya mencoba bermalam disana, saya mencoba berkeliling pulau jalan kaki dan bersepeda. Potensi alam dan budaya ini harus dilihat delegasi negara lain, jangan sampai mereka kesini hanya untuk bersidang," imbuhnya.

Ia mengaku prihatin Indonesia nan indah, kaya ragam budaya tersebut seok dalam menggaet target 7 juta wisatawan mancanegara. Negara tetangga Malaysia dinilainya jauh lebih berhasil karena sukses mendatangkan 20 juta turis setiap tahun.

RI serius mempersiapkan pelaksanaan Sidang Umum ke-33 AIPA (Asean Inter Parliamentary Assembly) yang dijadwalkan akan berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kebijakan memilih provinsi yang memiliki potensi pariwisata luar biasa ini diharapkan dapat membuka mata dunia tentang keragaman Indonesia.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat meninjau persiapan NTB dalam persiapan sidang AIPA

Marzuki berkeyakinan kerjasama parlemen dapat berperan meningkatkan hubungan antar negara. DPR telah menjalin pembicaraan dengan parlemen Cina untuk mendorong upaya mendatangkan wisatawan dari rakasaka ekonomi yang terus berkembang ini. "Penduduk Cina itu 1,4 miliar kalau kita bisa datangkan 1 persen saja, itu sudah 1,4 juta orang wisatawan, ini divisi bagi negara dan rakyat."

Diplomasi antara DPR dan parlemen Arab Saudi juga terbukti telah membantu pemerintah dalam meningkatkan kuota bagi jamaah haji Indonesia. Salah satu kesimpulan penting dalam konferensi parlemen anggota OKI di Palembang adalah meningkatkan kerjasama dalam mendukung upaya perlindungan tenaga kerja asing, termasuk TKI.

Dalam Sidang Umum AIPA ke-33 yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2012 yang akan datang juga dijadwalkan pertemuan dan penandatanganan MOU antara parlemen Asean dengan parlemen Afrika.

### Fasilitas Pendukung Pariwisata NTB Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya menyampaikan rasa kecewa usai meninjau fasilitas pendukung pariwisata di pulau Gili Trawangan. Ia menyoroti keterbatasan sarana transportasi menuju pulau untuk anggota delegasi, dermaga yang tidak layak serta beberapa bagian pulau yang terlihat tidak terawat dan dipenuhi sampah.

"Saya kecewa, kondisi ini perlu dibenahi pemprov. Apabila tidak, mungkin saya pertimbangkan mempromosikan tempat lain seperti Pulau Komodo yang termasuk the seventh wonder," tandasnya.

Ia membandingkan ketika Kamboja menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-32 dan mengajak anggota delegasi meninjau pulau Angkor Wat. Sarana transportasi dan fasilitas pendukung pariwisata disana dikelola secara profesional. "Kita harus mencoba lebih baik," demikian Andi. (iky) foto:ik/parle



Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. 30 Maret 2012. Foto:AS



Pemandangan unjuk rasa kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR-RI Jalan Gatot SUBroto, 30 Maret 2012. foto:RY



Tim Kunjungan Spesifik Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas yang dipimpin Deding Ishak melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Sekda Sumut Nurdin Lubis, di Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumut, Senin 19 Maret 2012. foto:IW/parle

